

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara baru merdeka di kala dua paham (Liberalisme dan Komunisme) menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia. Hal tersebut memaksa pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno untuk pandai dalam mengarahkan arah kendali kebangsaan melalui penerapan kebijakan luar negeri yang tepat sasaran khususnya dalam sektor utama yaitu ekonomi-politik global. Kebijakan yang paling terkenal hingga sekarang lahir dari pemikiran tokoh-tokoh zaman itu yaitu ideologi politik Pancasila dan kebijakan luar negeri Indonesia yang menganut paham Bebas-Aktif/*Non-Aligned Movement*. Pancasila sendiri menggambarkan prinsip negara Indonesia yang berdasar pada lima poin utama dalam merangkul seluruh rakyat dengan keberagaman suku, agama, ras, antar golongan demi mencapai cita-cita bangsa menjadi negara sejahtera di masa depan. Dilain sisi dalam menanggapi kondisi eksternal, Indonesia berpegang teguh kepada prinsip tidak memihak kepada satu pun blok yang ada baik itu Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat maupun Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Ini berlaku kepada berbagai sektor termasuk ekonomi (Darini, 2010).

Seiring berjalannya waktu kondisi ekonomi-politik Indonesia di masa-masa awal negara berdiri mengalami pasang-surut, salah satu peristiwa besar di sektor

ekonomi Indonesia pertama kali terjadi pada kepemimpinan Presiden Soekarno dimana negara mengalami inflasi sangat besar (*hyperinflation*) yang membuat harga-harga bahan pokok melonjak hingga menyentuh angka 600% di rentang waktu 1962-1965. Hal ini diakibatkan karena adanya program Presiden Soekarno untuk pembangunan mencetak rupiah demi membayar hutang dan membiayai banyak proyek-proyek megah sedangkan, program tersebut tidak diseimbangkan dengan pendapatan per kapita rakyat Indonesia. Alhasil, pemerintah harus memotong nilai tukar rupiah dari semula 1000 menjadi 1 rupiah (CNN Indonesia, 2022). Tahun-tahun tersebut tidak hanya diwarnai oleh masalah ekonomi namun juga gejolak politik yang dialami pemerintahan Presiden Soekarno hingga keterlibatan partai komunis Indonesia dalam aksi pemberontakan tahun 1965, peristiwa ini merupakan imbas dari kebijakan dalam negeri beliau yang ingin menyatukan tiga paham sekaligus yaitu NASAKOM (Nasionalisme, Agama dan Komunsime) berujung kepada pembunuhan ketujuh Jenderal TNI, mereka mencoba untuk mengubah ideologi negara menjadi Komunisme. Sejak peristiwa tersebut pemerintahan Presiden Soekarno (orde lama) digantikan oleh pemerintahan Presiden Soeharto (orde baru), sekaligus menjadi awal rentetan sejarah panjang dilarangnya segala bentuk aktifitas ekonomi-politik yang berhubungan dengan Komunisme di Indonesia termasuk pembekuan hubungan diplomatik dengan Tiongkok pada saat itu (Darini, 2010).

Perjalanan ekonomi-politik Indonesia dibawah kepemimpinan presiden Soeharto tercatat berlangsung selama tiga puluh dua tahun dan dapat disebut sebagai rezim otoriter, namun demikian tidak dapat dipungkiri dengan sistem ini

kondisi negara Indonesia terbukti relatif stabil dalam mengarungi ketidakpastian global saat itu yang berada dalam awan gelap perang dingin antara blok barat dan blok timur. Masa-masa ini kegiatan ekonomi Indonesia lebih mengarah ke liberalisme ekonomi karena tidak terlepas dari pengaruh pesatnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat hingga mencapai puncak hegemoni global (Darini, 2010).

Pada saat itu Indonesia “di”manja”kan” dengan hutang luar negeri yang didapat dari pinjaman Bank Dunia. Banyak pembangunan dilakukan oleh pemerintah Indonesia, namun pada akhirnya membawa Indonesia kembali masuk kedalam krisis ekonomi-politik kedua dalam sejarah negeri pada tahun 1998. Hal ini disebabkan karena tidak terkontrolnya hutang luar negeri, krisis keuangan global dan ditambah dengan banyaknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan pejabat negara di masa itu sehingga, membuat Indonesia jatuh kedalam jurang krisis ekonomi. Nilai tukar rupiah tidak kuasa menghadapi keperkasaan US Dollar hingga naik puluhan kali lipat, kondisi ini sekaligus sebagai penanda berakhirnya rezim otoriter presiden Soeharto dan membuat Indonesia memasuki masa reformasi di segala bidang termasuk ekonomi-politik. Hingga saat ini di era pemerintahan presiden Joko Widodo, dapat dikatakan Indonesia menganut sistem ekonomi-politik Neo Liberalisme dengan ideologi Pancasila. Ciri khas sistem ini terletak pada peran aktor non negara yang terlibat langsung bekerja sama dengan pemerintah dalam membangun dan menjalankan kegiatan ekonomi negara (Darini, 2010). Kondisi serupa dialami oleh Tiongkok diawal-awal berdirinya, terdapat

banyak perpindahan kekuasaan yang bertujuan mendapatkan “ramuan” tepat dalam bernegara demi mensejahterakan rakyatnya.

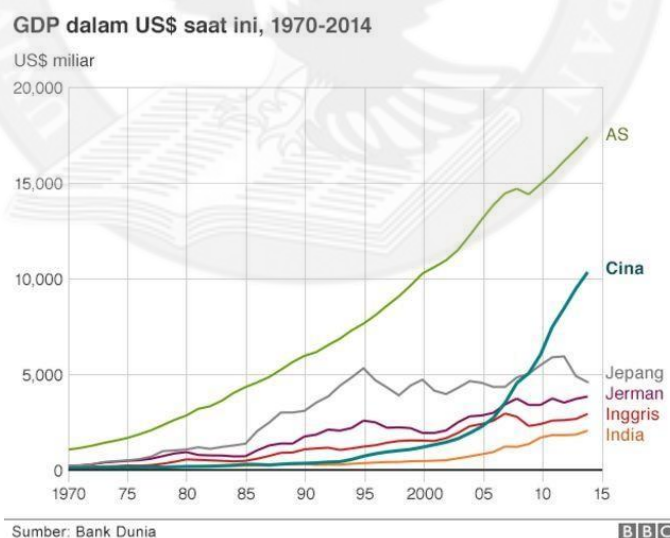


Gambar 1. 1: Pergerakan Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar Diakhir Masa Orde Baru

Tiongkok merupakan negara yang mampu muncul sebagai kekuatan ekonomi global sekaligus penantang utama hegemoni Amerika Serikat dalam kurun waktu beberapa dekade kebelakang. Hal ini tentu tidak terlepas dari strategi kebijakan pemerintahannya yang berhasil menerapkan kombinasi sistem ekonomi-politik dengan sangat baik. Seperti diketahui bersama bahwa semenjak kalahnya Partai Kuomintang (Nasionalis) yang dipimpin oleh Chiang Kai Sek dan terusir dari daratan Tiongkok maka sistem politik negara berubah menjadi Komunisme yang dipimpin oleh Mao Zedong pada tahun 1949 (Darini, 2010). Tiongkok menerapkan sistem ekonomi terpusat, diikuti industrialisasi Uni Soviet yang mengarahkan sepenuhnya pengendalian oleh negara khususnya kegiatan-kegiatan strategis industri (Liu, 2015).

Sepeninggalan Mao Zedong Tiongkok mengalami transisi selama tiga puluh tahun (1978-2008), salah satunya terjadi perubahan yang semula sistem ekonomi terpusat digantikan menjadi sistem ekonomi pasar. Sepak terjang di

bidang ekonomi mereka lakukan dengan menerapkan kebijakan *open door* yang membuat area ekonomi khusus di daerah-daerah pesisir selatan mereka dimana itu merupakan area pemrosesan ekspor untuk perdagangan internasional dan investasi asing. Hal ini yang membuat Tiongkok akhirnya mampu menciptakan zona perdagangan bebas dan pengembangan teknologi tinggi sehingga mampu menarik banyak investasi asing dalam sektor-sektor terkait, sekaligus yang membuat Tiongkok dapat selamat dari krisis ekonomi global di tahun 1997-1998. Kebijakan ini yang terus dipertahankan pemerintah Tiongkok hingga sekarang menjadikannya kekuatan ekonomi terbesar dunia bersaing langsung dengan Amerika Serikat. Dapat dikatakan walaupun sistem politik negara Tiongkok menganut paham Komunisme namun dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya mereka menggunakan sistem kapitalisme yang terbuka terhadap perdagangan bebas (Darini, 2010).



Gambar 1. 2: Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok dilihat dari GDP 1970-2015. Sumber: Grafik Bank Dunia

Baik Indonesia dan Tiongkok dari segi sistem politik memiliki perbedaan yang sangat kontras dapat dilihat bahwa sistem yang dianut Tiongkok merupakan

komunisme yang mengedepankan keterpusatan kekuasaan kepada negara dimana segala bentuk alat produksi strategis manufaktur diatur dan dikendalikan negara dengan harapan kesenjangan dalam kehidupan sosial masyarakat dapat terjaga. Berbeda dengan Indonesia yang menerapkan sistem politik pancasila yang mengedepankan kepada kesepakatan dan kebebasan bersama dalam menyampaikan pendapat di ranah sosial (demokrasi) sehingga, memungkinkan baik swasta maupun pemerintah bekerja sama dalam memajukan ekonomi negara dalam pengembangan industri manufaktur. Dengan menyediakan lapangan pekerjaan negara berperan aktif untuk ikut mensejahterakan kehidupan rakyat. Dari segi ekonomi juga terdapat kontrasi pengaturan dimana peran negara yang kuat dalam paham komunisme sering kali menimbulkan monopoli terhadap pusat-pusat produksi yang dilakukan oleh negara, hal ini berkebalikan dengan paham Pancasila yang justru mengedepankan peran negara dalam mencegah adanya monopoli yang merugikan masyarakat luas.

Globalisasi dalam bidang ekonomi-politik pasca perang dingin membawa banyak perubahan bagi setiap negara dalam bertindak dan merespon kerja sama internasional, banyak yang mengatakan bahwa globalisasi sebagai tanda kemajuan suatu peradaban sekaligus untuk mempercepat terciptanya suatu sistem negara universal yang dicita-citakan oleh Immanuel Kant, dikarenakan semenjak adanya arus globalisasi ketergantungan di antara negara-negara semakin mengikat satu dengan lain. Proses ini merupakan suatu bentuk liberalisasi perdagangan internasional (*Free Trade*) dan inovasi di bidang ilmu pengetahuan teknologi informasi, praktik globalisasi banyak melibatkan aktor pemerintah negara, non

negara, institusi internasional, perusahaan dalam negeri hingga individu-individu yang berada dalam masyarakat. Dengan adanya fakta-fakta diatas maka tentu hubungan bilateral dan multilateral antar negara membutuhkan cara yang tepat agar mampu memberi manfaat yang *win-win*, oleh karena itu pemerintahan Indonesia

dibawah pemerintahan Joko Widodo mengaplikasikan kebijakan luar negeri melalui diplomasi ekonomi demi menunjang hubungan kerja sama internasional dengan negara-negara lain termasuk Tiongkok (Mardhiyyah & Suryadipura, 2023).

Dengan mencontoh apa yang telah dilakukan dan dicapai oleh Tiongkok dalam perjalanannya menjadi kekuatan ekonomi dunia maka, melalui kerja sama ekonomi diharapkan dapat menarik investor asing (*Foreign Direct Investment*) untuk menanamkan modalnya kedalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, dengan begitu pertumbuhan ekonomi dalam negeri Indonesia dapat terkerek naik khususnya di sektor perdagangan (*Export-Import*), lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia dapat disediakan dalam jumlah yang besar dan melimpah. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat dunia membuat kemajuan dalam tiga sektor diatas sangat krusial dan perlu diwujudkan secepat mungkin.

Dalam menerapkan diplomasi ekonomi Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang sangat aktif demi memperkuat pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diplomasi internasional dilakukan lebih keluar (*Outward Looking*), dimana dengan memanfaatkan keanggotaan dalam banyak forum internasional Indonesia mencoba menampilkan *image* baik kepada negara-negara lain salah satu melalui forum

ekonomi dunia untuk kawasan Asia Timur (*World Forum Economic East Asia*) yang kesebelas. Berlanjut di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo Indonesia juga memanfaatkan forum-forum internasional seperti presidensi G20 ditahun 2022 dan keketuaan KTT ASEAN ditahun 2023, ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dari negara-negara lain terhadap eksistensi Indonesia di kancah global (Mardhiyyah & Suryadipura, 2023).

Pada tahun 2014 diawal pemerintahannya Presiden Joko Widodo mempertegas bahwa agenda utama kepemimpinannya adalah dengan memprioritaskan diplomasi ekonomi kedalam kebijakan luar negeri hal ini menjadi bagian dari visi dan misi utama presiden Joko Widodo yang berpusat pada pembangunan infrastruktur dan keterhubungan maritim (Jalur Laut). Beliau membuktikan keseriusannya dengan kunjungan kerja pertama dilakukan untuk bertemu dengan para pengusaha-pengusaha Tiongkok, baginya infrastruktur merupakan kunci utama dalam mendorong perekonomian dalam negeri karena dengan semakin baiknya kondisi infrastruktur dalam negeri Indonesia maka masalah-masalah seperti biaya perjalanan produk dapat ditekan sehingga hal tersebut dapat mereduksi harga-harga produk yang sampai kepada masyarakat. Dilain sisi daya saing produk Indonesia di luar negeri tentu saja akan ikut meningkat dan pada akhirnya produk impor akan mampu ditekan demi menjaga tingkat inflasi perdagangan. Untuk mewujudkan ambisi tersebut maka diperlukan biaya investasi yang besar hingga mencapai 356 Miliar USD, ini yang menjadi tugas utama lembaga-lembaga negara seperti Kemlu (Kementerian Luar Negeri) dalam menerapkan diplomasi ekonomi secara bilateral maupun multilateral demi

membantu percepatan ekonomi dalam negeri Indonesia (Mardhiyyah & Suryadipura, 2023).

Rencana diplomasi ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo mendapatkan sambutan baik dari Tiongkok karena sejalan dengan rencana bernegaranya yang memfokuskan menyebarkan pengaruhnya lebih luas di kawasan Asia-Pasifik melalui kegiatan ekonomi dan investasi, tentu dengan demikian hal tersebut sangat memenuhi syarat kedua negara untuk menjalin kerja sama bilateral yang lebih serius. Penulis memilih topik ini untuk diteliti karena mengingat hubungan kedua negara semakin hari semakin berkembang kedalam saling ketergantungan ekonomi (Interdependensi Ekonomi) maka, penting untuk mengetahui seberapa jauh hubungan ini dapat berjalan dan sudah sejauh mana dampak yang diberikan dari adanya kerja sama ini baik positif maupun negatif.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan diatas dapat disimpulkan bahwa baik Indonesia dan Tiongkok memiliki perbedaan yang sangat mencolok dalam prinsip dasar bernegara. Tentu menarik untuk diteliti apabila dua negara yang memiliki pandangan politik berseberangan dapat tetap bekerja sama secara ekonomi. Oleh, karenanya penelitian ini merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab sebagai berikut: a.) Mengapa hubungan ekonomi Indonesia-Tiongkok dapat berjalan dengan sangat baik walaupun terdapat perbedaan sistem ekonomi-politik yang signifikan diantara keduanya? b.) Apa tantangan-tantangan yang

menjadi hambatan dalam diplomasi ekonomi kedua negara selama pemerintahan presiden Joko Widodo?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat: a.) memberikan dan memperkaya informasi akademis dalam bidang Hubungan Internasional mengenai solusi-solusi terkait dengan hubungan diplomasi ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok; dan b.) menemukan jawaban atas faktor pendorong eratnya hubungan diplomasi ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok meski diatas kertas keduanya memiliki perbedaan prinsip bernegara yang sangat mencolok.

1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam empat hal. **Pertama** menjadi referensi mengenai penerapan diplomasi ekonomi dalam kebijakan luar negeri Indonesia di masa depan. Dengan belajar dari kesuksesan negara lain seperti Tiongkok maka Indonesia kedepan dapat meniru dalam penerapan-penerapan kebijakan di bidang ekonomi yang lebih Pro Rakyat demi mewujudkan sila kelima dalam Pancasila (Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). **Kedua**, membantu dalam memberikan pandangan analitis mengenai tingkat manfaat yang di dapat dari kebijakan diplomasi ekonomi yang selama ini telah dijalankan oleh pemerintahan presiden Joko Widodo. **Ketiga** menjadi masukan kepada pemerintahan Indonesia kedepan pasca presiden Joko Widodo dalam melanjutkan dan mengaplikasikan diplomasi ekonomi dengan Tiongkok. **Keempat**, yaitu

menambah pengetahuan pembaca mengenai dinamika sistem ekonomi-politik global dalam keterkaitannya dengan kerjasama dan penentuan suatu kebijakan ekonomi negara di era globalisasi (Pasar Bebas).

1.5 Sistematika Penelitian

Bab I-PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian yang menyajikan inti-inti utama dari pembahasan dalam tulisan, rumusan masalah yang menerangkan lebih spesifik arah dari tulisan melalui beberapa pertanyaan yang akan dijawab dari hasil penelitian, tujuan signifikansi penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II-TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

Bab ini berisi mengenai kajian tinjauan literatur mengenai sistem ekonomi-politik Indonesia dan Tiongkok yang berpengaruh kepada arah kerja sama ekonomi kedua negara di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Data *foreign direct investment* (FDI), perdagangan (Ekspor-Impor) dan ketenagakerjaan akan digunakan sebagai penunjang analisis penelitian, serta dengan menggunakan teori Liberalisme beserta konsep *economic interdependence* sebagai landasan penelitian.

Bab III-METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memaparkan mengenai metode yang digunakan oleh penulis dalam mengolah data yaitu kualitatif dengan mengambil data-data kepustakaan dan kelembagaan terkait yaitu kementerian luar negeri, investasi, perdagangan serta

ketenagakerjaan. Setelahnya, data akan dijabarkan secara deskriptif sehingga runtutan masalah yang menjadi pertanyaan penelitian dapat terjawab.

Bab IV-HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian yang akan tersaji dalam bab ini didapat dari analisis yang dilakukan dan akan berhubungan dengan bentuk-bentuk kerja sama ekonomi antara Indonesia-Tiongkok di masa pemerintahan Joko Widodo. Juga dibahas manfaat yang sudah dan akan didapat dari hubungan kerja sama ekonomi ini, tingkat pengaruh perbedaan sistem ekonomi-politik terhadap eratnya hubungan kerja sama ekonomi antara Indonesia-Tiongkok serta indikator apa yang membuat kebijakan ini dapat dikatakan berhasil dan masih layak dilanjutkan di masa depan pasca pemerintahan Joko Widodo.

Bab V-KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini menyajikan kesimpulan dari penelitian dan rekomendasi pencegahan untuk meminimalkan dampak buruk dari penerapan kebijakan diplomasi ekonomi Indonesia-Tiongkok di masa depan.